

1st WEEK**September 2020**❖ **MAKRO**

- Suku bunga mendekati nol kemungkinan besar akan bertahan tidak selama berbulan-bulan tetapi bertahun-tahun karena Federal Reserve berusaha merekayasa ulang ekonomi yang ditandai dengan inflasi rendah dan pasar tenaga kerja yang tidak merata. Wall Street bersiap untuk kembali ke hari-hari pasca-Resesi Hebat, ketika suku bunga terendah jangka pendek berlaku selama tujuh tahun bahkan sebelum The Fed mencoba menaikkannya. Pejabat Fed telah menguraikan kebijakan yang direvisi di mana sekarang akan menargetkan "inflasi rata-rata," yang berarti toleransi yang lebih tinggi untuk inflasi di atas 2% sebelum menaikkan suku bunga dari level saat ini. Di masa lalu, Fed akan mempertimbangkan penurunan suku bunga ketika pengangguran mulai turun sebagai tanda bahwa inflasi tidak akan lama lagi. Dalam keadaan sekarang, pertanyaan yang tersisa adalah seberapa dalam komitmen Fed terhadap inflasi akan berjalan, apa yang akan dianggap sebagai pengangguran penuh, dan berapa tahun yang akan berarti bagi suku bunga nol.

- IMF mengatakan bahwa semua kemungkinan skenario Brexit akan "memerlukan biaya", tetapi kepergian yang tidak teratur dapat menyebabkan "hasil yang jauh lebih buruk". Tantangan dalam mencapai kesepakatan tetap "menakutkan", katanya. IMF memperkirakan ekonomi Inggris tumbuh 1,5% pada 2018 dan 2019 jika kesepakatan Brexit dicapai. Prediksi tersebut muncul dalam penilaian tahunan terbaru IMF terhadap ekonomi Inggris. Christine Lagarde, direktur pelaksana IMF, mengatakan pada konferensi pers di Departemen Keuangan di London: "Proyeksi tersebut mengasumsikan kesepakatan yang tepat waktu dengan UE mengenai perjanjian perdagangan bebas yang luas dan proses Brexit yang relatif teratur setelah itu. "Kesepakatan apa pun tidak akan sebaik proses mulus di mana barang, jasa, orang, dan modal bergerak antara UE dan Inggris tanpa hambatan dan rintangan." Kanselir, Philip Hammond, mengatakan pemerintah harus mendengarkan IMF "peringatan yang jelas".

- Ulasan:

Ketua mengatakan pendekatan yang ditingkatkan untuk inflasi dan filosofi tentang ketenagakerjaan yang tidak hanya melihat pada tingkat tertentu lagi tetapi lebih menargetkan distribusi keuntungan di sepanjang spektrum pendapatan.

❖ **MIKRO**

- Wacana dikembalikannya peran pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) kembali hangat belakangan ini. Wacana ini kembali sorotan sejalan dengan mencuatnya wacana reformasi sistem keuangan dan revisi Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di mana di dalamnya memuat Dewan Moneter. BI memang sebelumnya pernah melakukan pengawasan perbankan. Namun, peran pengawasan itu kemudian dilimpahkan ke OJK tak lama setelah terbentuk. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini setidaknya ada dua yang menjadi sorotan. Pertama, kinerja OJK yang belum optimal yang tercermin dari sejumlah masalah salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kedua, berkaitan dengan partisipasi BI untuk turut menanggung beban bersama (burden sharing) dengan pemerintah yang dinilai masih tarik ulur. "Dengan proses ini saya kira ada dua hal yang harus diputuskan berbeda," katanya kepada detikcom, Jumat (4/9/2020).

- Realisasi penyaluran penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih minim. Padahal, pemerintah berharap dana yang dititip bisa disalurkan dua kali lipat. Pemerintah telah menitipkan dana Rp 11,5 triliun kepada beberapa BPD. Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, realisasi penyaluran dana titipan pemerintah ke BPD baru sebesar Rp 1,58 triliun hingga 19 Agustus 2020. "Hingga 19 Agustus 2020 telah disalurkan sebesar Rp 1,58 triliun karena memang masih sangat pendek waktunya," kata Wimboh di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Dana pemerintah sebesar Rp 11,5 triliun dititipkan ke tujuh BPD, seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) Rp 2,5 triliun, PT Bank DKI Rp 2 triliun, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Rp 2 triliun, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Rp 2 triliun, dan PT Bank SulutGo Rp 2 triliun.

Wimboh mengatakan, penempatan dana pemerintah ke BPD sudah menjangkau sekitar 3.559 debitur di daerah. Dirinya pun berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak debitur di daerah.

- Ulasan:

Berkaitan dengan OJK, seharusnya dilihat lagi perbaikan sistem, manajerial hingga kepemimpinannya. Jika performa tidak baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Namun, itu bukan berarti jika OJK bermasalah kewenangannya harus dikembalikan ke BI. Sebab, kondisi saat ini memiliki kompleksitas dan masalah yang berbeda.

❖ **PERBANKAN**

- Bank BRI menghadirkan program cicilan pembayaran iuran bunga ringan Kartu Kredit BRI untuk memberikan kemudahan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kerja sama ini dilakukan untuk mendorong para peserta program JKN-KIS rutin membayar iuran peserta. Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan melalui program ini, para pemegang Kartu Kredit BRI diberikan kemudahan dengan cicilan iuran dan bunga ringan untuk keanggotaan peserta JKN-KIS. "Peserta dapat memanfaatkan program ini untuk membantu memastikan status kepesertaan aktif dengan patuh terhadap pembayaran iuran," ujar Handayani dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020). Pemerintah, melalui Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 telah mengatur pemberian relaksasi pembayaran tunggakan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk memastikan warga mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan.

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb/BJBR) mengangkat Direktur Komersial dan UMKM dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa (1/9/2020). Perseroan mengangkat Nancy Adistyasari untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Komersial dan UMKM. Nancy telah berkarier sejak lama sebagai bankir di Bank Mandiri, dengan jabatan terakhir Senior Vice President Commercial Banking Bank Mandiri. Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan dengan telah lengkapnya jajaran direksi, perseroan bisa menggenjot pertumbuhan kredit di segmen komersial dan UMKM. "Dalam rangka berkontribusi dan berpartisipasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, bank

bjb senantiasa berupaya mengoptimalkan penyaluran kredit terutama kredit produktif di segmen komersial dan UMKM sehingga roda perekonomian dapat kembali berputar, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang memadai," kata Widi, Rabu (2/9/2020).

- Ulasan:

Inovasi layanan perbankan diharapkan dapat membantu dan memperkuat keberlangsungan implementasi program JKN-KIS, apalagi di era pandemi seperti saat ini kebutuhan peserta terhadap jaminan pelayanan kesehatan cukup besar.

Disclaimer: Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.